

Siaran Pers

MENTERI BAPPENAS: PEMERINTAH FOKUS MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DI SELATAN JAWA

YOGYAKARTA (15/3) – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa bagian selatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah kesenjangan dan ketimpangan wilayah antara Jawa bagian utara dan Jawa bagian selatan. “Intinya, pemerintah ingin meningkatkan konektivitas Jawa bagian selatan, misalnya pembangunan rel kereta api bagian utara sudah *double track*, karena itu pemerintah sekarang fokus membangun infrastruktur wilayah Jawa bagian selatan,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas saat menghadapi pertanyaan wartawan usai memberikan arahan dalam acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) D.I. Yogyakarta, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2018 pada Rabu, 15/3 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas, juga hadir Gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Tumenggung, dan Kepala Bappeda D.I. Yogyakarta, Tavip Agus Rayanto.

Saat ditanya wartawan mengenai pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018, Bambang mengatakan tetap sama dengan 2017. Hanya saja, kata Bambang, untuk pemanfaatan DAK 2018 pemerintah berharap agar semua daerah, termasuk D.I. Yogyakarta fokus pada tiga hal, yaitu: masalah sanitasi, air bersih, dan juga peningkatan pendidikan vokasi. Menurut Bambang saat ini pemerintah intensif meningkatkan pendidikan vokasi karena secara nasional pemerintah melihat pendidikan vokasi masih kurang. “Padahal banyak sekali kebutuhan tenaga kerja terampil yang seharusnya disiapkan melalui pendidikan vokasi,” tutur Bambang.

Saat memberikan pengarahannya kepada peserta Musrenbangprov D.I. Yogyakarta, Bambang menjelaskan proyeksi pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1 persen membutuhkan kontribusi pembangunan wilayah per pulau. Pulau Sumatera diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,97 persen, Pulau Jawa diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,23 persen, Pulau Bali-Nusa Tenggara diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,04 persen, Pulau Kalimantan diharapkan dapat tumbuh sebesar 4,37 persen, Pulau Sulawesi diharapkan tumbuh sebesar 7,35 persen, Kepulauan Maluku diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,18 persen, serta Pulau Papua diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,87 persen. Khusus untuk provinsi D.I. Yogyakarta, diharapkan dapat tumbuh 6,02 persen dengan menjaga momentum pertumbuhan keempat sektor. “Pertumbuhan ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta perlu didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor konstruksi, serta sektor jasa pendidikan dengan kontribusi total sebesar 51,84 persen,” jelas Bambang.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat melaksanakan dua langkah konkret untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut. *Pertama*, investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu: infrastruktur transportasi dan logistik; dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (*leverage*) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur adalah implementasi mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP).

Kedua, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan yang menghalangi berkembangnya swasta di enam sektor utama, membenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural. Sebagaimana arahan Presiden, pembangunan juga diprioritaskan pada sektor pariwisata yang memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, provinsi D.I. Yogyakarta merupakan satu dari tiga program prioritas pengembangan tiga kawasan pariwisata nasional, yaitu Borobudur, selain Danau Toba dan Mandalika. Beberapa proyek prioritas yang menjadi arahan Bambang, antara lain peningkatan aksesibilitas pariwisata, penyusunan *masterplan* terpadu dan rencana rinci tata ruang, penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik pariwisata, peningkatan citra pariwisata di dalam dan luar negeri, peningkatan akses informasi dan pemasaran produk wisata, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan daya saing produk dan jasa UMKM, penciptaan destinasi wisata bersih, sehat dan berkelanjutan, penciptaan destinasi wisata yang aman dan tertib, dan mitigasi bencana dan risiko lain di destinasi wisata.

Sebagai pesan penutup, Bambang menekankan pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan serta urgensi pendekatan multi-sektor dan kewilayahan dalam rangka mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. “Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota ada dua hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan). *Kedua*, perkuatan DAK penugasan dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional,” pungkas beliau. ■

Jakarta, 15 Maret 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31936207, 3905650; Faksimile (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id